

Lubuk Pakam, .....

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Deli Serdang

Perihal : Permohonan Izin Tanda Daftar Panti  
Jompo

di –

Lubuk Pakam

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Memohon kepada Bapak kiranya dapat menerbitkan Izin Tanda Daftar Panti Jompo  
dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama Yayasan : .....

Lokasi : .....

Kelurahan / Desa : .....

Kecamatan : .....

Demikian permohonan ini disampaikan dan saya akan memenuhi segala ketentuan  
Peraturan Perundangan yang berlaku dan jika saya melanggar maka saya bersedia diberikan  
sanksi sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,  
Pemohon

Materai  
Rp. 10.000,-

(.....)

## FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Nama Lembaga / Institusi /  
Perusahaan : .....  
Jabatan dalam Lembaga /  
Institusi / Perusahaan : .....  
Alamat Pribadi Lembaga /  
Institusi / Perusahaan : .....

Adalah benar merupakan pribadi /pimpinan dari lembaga / Institusi / Perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi / pimpinan dari lembaga / Institusi / Perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang, Saya menyatakan bersedia untuk :

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada Petugas / Pegawai, Pejabat DPMPTSP Kab. Deli Serdang, segala bentuk pemberian / gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Kab. Deli Serdang.
2. Tidak mempergunakan jasa calo, kecuali Biro Jasa yang Berbadan Hukum dalam hal pengurusan Izin.
3. Tidak akan melakukan segala tindakan yang tidak sah kepada Petugas / Pegawai, Pejabat DPMPTSP Kab. Deli Serdang dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Mematuhi Standar Operasioal Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan.
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya sampaikan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Dan apabila tidak sesuai / tidak benar, maka produk hukum yang diterbitkan berdasarkan permohonan adalah tidak sah dengan sendirinya dan Saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Petugas / Pegawai, Pejabat DPMPTSP Kab. Deli Serdang.
6. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya belum pernah bermohon diterbitkan Izin yang sejenis diatas alamat yang dimohonkan.
7. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi FAKTA INTEGRITAS ini, maka Saya atas nama pribadi / Lembaga / Institusi / Perusahaan bersedia untuk di proses berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LubukPakam : .....

Tanggal : .....

Saya yang membuat pernyataan  
Pemohon,

Materai  
Rp. 10.000,-

( ..... )

FORMAT SURAT

*(KOP SURAT LKS / YAYASAN )*

---

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :  
NIK :  
Jabatan :  
Nama Yayasan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk menerima anak yatim piatu dan anak terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ke Yayasan/ Panti Asuhan *(Diisi Nama Yayasan/ Nama Panti)* Sebanyak 20 % dari Kuota yang ada.

Demikian Surat Pernyataan Perjanjian Kerjasama ini Saya buat dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Lubuk Pakam, *(diisi tanggal, Bulan, Tahun)*  
(Nama Yayasan/Panti)  
K e t u a,

*(Diisi Nama Pemohon)*

Format Surat

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ATAU TIDAK DALAM PERKARA DI PENGADILAN

Kop Surat LKS  
SURAT PERNYATAAN

Nomor: .....

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan ditandatangani Surat Pernyataan ini LKS ..... benar-benar tidak sedang dalam sengketa Pengurus dan tidak sedang dalam perkara di Pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

..... (kab/kota, provinsi), .....(tanggal), (bulan), (tahun)

Yang menyatakan,

Ketua

Materai  
Rp. 10.000,-

(.....Nama.....)

B. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAPORKAN KEGIATAN

Kop Surat LKS

SURAT PERNYATAAN

Nomor: .....

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Nomor NIK : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa LKS ..... bersedia untuk menyampaikan Laporan Kegiatan serta dokumen-dokumen pendukung laporan secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (kab/kota, provinsi), .....(tanggal), (bulan), (tahun)

Yang menyatakan,

Ketua

Materai  
Rp. 10.000,-

(.....*Nama*.....)

C. SURAT PERNYATAAN BAHWA SUMBER PENDANAAN TIDAK BERASAL DARI KEGIATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN YANG MELAWAN HUKUM

Kop Surat LKS

SURAT PERNYATAAN

Nomor: .....

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

NIK : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa seluruh sumber pendanaan yang dimiliki oleh LKS ..... tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak akan digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (kab/kota, provinsi), .....(tanggal), (bulan), (tahun)

Yang menyatakan,

Ketua

Materai  
Rp. 10.000,-

(.....Nama.....)

D. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Posisi	Tandatangan
1.		Tetangga sebelah kiri	
2.		Tetangga sebelah kanan	
3.		Tetangga di depan	
4.		Tetangga di belakang	

Adalah benar warga RT..../RW....Kelurahan....., Kecamatan....., Kota/Kabupaten....., Provinsi....., dengan ini menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan terhadap keberadaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh:

Nama LKS : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Jenis Layanan/Kegiatan : .....  
Nama Ketua : .....  
NIK : .....  
Nomor Telepon : .....

Demikian surat pernyataan persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh warga yang menyetujui untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Lurah/Kepala Desa.....  
Kecamatan.....

Menyetujui,  
Ketua RT.../RW...

(Nama jelas & Cap Kelurahan/ Desa)

(Nama jelas & Cap RT/RW)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Camat Setempat
2. Arsip

*Catatan:*

*Melampirkan fotokopi KTP tetangga yang menyetujui*



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Mawar Nomor 18 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514 Telepon.  
(061) - 795 6111 Faksimile. (061) – 795 6222

Pos-el: [dinassosialdeliserdang@gmail.com](mailto:dinassosialdeliserdang@gmail.com) Laman: [www.dinsos.deliserdangkab.go.id](http://www.dinsos.deliserdangkab.go.id)

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. PIHAK PERTAMA**

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang  
Alamat : Kw. Pemerintahan Deli Serdang, Jl. Medan - Tebing Tinggi, Tj. Garbus Satu, Kec.  
Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang**.

**2. PIHAK KEDUA**

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Pimpinan LKS \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Kesejahteraan Sosial [Nama Panti]**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) .

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan pelayanan sosial.

PIHAK KEDUA bersedia menerima, mengasuh, membina, dan memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 20% dari kuota yang ada.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan prinsip tanggung jawab, koordinasi, dan saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Deli Serdang

**PIHAK KEDUA**

Pimpinan Lembaga  
Kesejahteraan Sosial

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )